



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 28 /M.RB.05/2017
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Permohonan Penyampaian Usulan ASN
sebagai Tim Ahli Asistensi RB di Daerah

17 April 2017

Yth. Para Gubernur

di
Tempat

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pemerintah daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan melaksanakan kegiatan asistensi pelaksanaan RB pada 34 provinsi di Indonesia. Untuk mendukung pelaksanaan asistensi ini, akan dibentuk tim ahli asistensi yang terdiri dari birokrat/Aparatur Sipil Negara dan akademisi di provinsi setempat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan saudara agar mengusulkan 3 (tiga) orang ASN yang bekerja di lingkungan pemerintah provinsi saudara sebagai anggota dari tim ahli asistensi RB. Sementara untuk perwakilan dari akademisi akan ditunjuk oleh tim dari Universitas Indonesia.

Adapun tugas dari tim ahli ini diantaranya adalah memberikan asistensi kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota, memantau kemajuan pelaksanaan asistensi tersebut, dan melaporkan hasilnya kepada kami.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama saudara, disampaikan terima kasih.

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi/
Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional



Asman Abnur

Tembusan:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia/ Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional;
2. Menteri Dalam Negeri.

Lampiran
Surat No. B/28 /M.RB.05/2017
Tanggal 17 April 2017

Yth. Para Gubernur

1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Sumatera Utara
3. Provinsi Sumatera Barat
4. Provinsi Riau
5. Provinsi Kepulauan Riau
6. Provinsi Jambi
7. Provinsi Sumatera Selatan
8. Provinsi Bangka Belitung
9. Provinsi Bengkulu
10. Provinsi Lampung
11. Provinsi DKI Jakarta
12. Provinsi Jawa Barat
13. Provinsi Banten
14. Provinsi Jawa Tengah
15. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
16. Provinsi Jawa Timur
17. Provinsi Bali
18. Provinsi Nusa Tenggara Barat
19. Provinsi Nusa Tenggara Timur
20. Provinsi Kalimantan Barat
21. Provinsi Kalimantan Tengah
22. Provinsi Kalimantan Selatan
23. Provinsi Kalimantan Timur
24. Provinsi Kalimantan Utara
25. Provinsi Sulawesi Utara
26. Provinsi Sulawesi Barat
27. Provinsi Sulawesi Tengah
28. Provinsi Sulawesi Tenggara
29. Provinsi Sulawesi Selatan
30. Provinsi Gorontalo
31. Provinsi Maluku
32. Provinsi Maluku Utara
33. Provinsi Papua Barat
34. Provinsi Papua